



Hk. 04.01 / 267 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 177 /M.PPN/04/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
DENGAN *THE WORLD BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang: a. bahwa untuk mengembangkan Kota/Kabupaten yang mandiri dan dapat memberikan pelayanan publik secara layak, mendukung pengembangan ekonomi Daerah, dan mengurangi kemiskinan di perkotaan, diperlukan adanya pembaruan tata pemerintahan dan pengembangan investasi pada sektor infrastruktur publik;
- b. bahwa mengingat besarnya kebutuhan dana untuk pelaksanaan program tersebut dan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Indonesia diperlukan dukungan dan pinjaman luar negeri dari the World Bank;
- c. bahwa untuk efektifitas pemanfaatan dan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan the World Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP) DENGAN PIHAK THE WORLD BANK.

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi USDRP dengan *the World Bank* pada tanggal 12 April 2005 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA: Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.
3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Tatag Wiranto
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Patana Rantetoding
Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai Wakil Ketua
3. Prasetijono Widjojo, MJ
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Anggito Abimanyu
Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan Dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI), Departemen Keuangan Sebagai Anggota
5. Mulia P. Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
6. Penny Lukito-Firdaus
Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
7. Delthy S. Simatupang
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
8. Bambang Goeritno
Direktur Bina Teknik, Ditjen TPTP, Departemen Pekerjaan Umum. Sebagai Anggota
9. Arlen Pakpahan
Kepala Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
10. Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
11. Dharma Bakti
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Sebagai Anggota

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 12. | Haryo Sasongko
Direktur Perkotaan, Ditjen Bangda,
Departemen Dalam Negeri | Sebagai Anggota |
| 13. | Maurin Sitorus
Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 14. | Tjindra Parma W
Kepala Biro Hukum, Departemen Pekerjaan Umum. | Sebagai Anggota |

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Penny Lukito-Firdaus
Direktur Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Ketua |
| 2. | Bambang Goeritno
Direktur Bina Teknik,
Ditjen TPTP, Departemen Pekerjaan Umum. | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. | Hermany Noor
Kasubdit PHLN I, Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 4. | Sidik Budiman
Kasubdit Pinjaman Pemerintah Daerah,
Ditjen Pengelolaan Penerusan Pinjaman,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 5. | Rinella Tambunan
Kasubdit Kawasan Perkotaan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 6. | Hindun Barokah
Kasubdit Kawasan Metropolitan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 7. | Obrian Saragih
Kasubdit Multilateral II,
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 8. | Andreas Suhono
Kasubdit Penyiapan Kebijakan dan Strategi
Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai Anggota |
| 9. | Agustin Arry Yanna
Kasi World Bank Direktorat Pendanaan Luar
Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 10. | Rudi S. Prawiradinata
Kasi Kebijakan Kawasan Perkotaan,
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Deputi Bidang Otda & Pengembangan Regional,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 11. | Dadang Sumantri
Kasubdit Pelayanan Jasa Perkotaan,
Direktorat Perkotaan, Dirjen Bina Bangda,
Departemen Dalam Negeri | Sebagai Anggota |
| 12. | Niken Pudyastuti
Kasi PHLN IB, Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 13. | Syamsul Hadi
Kasi Perencanaan Umum
Dit. Bintek Ditjen Tata Perkotaan dan Tata
Perdesaan, Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai Anggota |
| 14. | Dwityo Akoro
Kasi Evaluasi, Dit. Wilayah Tengah,
Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai Anggota |
| 15. | Diana Kusumastuti
Pimbagpro Pengembangan Kebijakan Perkotaan
Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai Anggota |
| 16. | Effendi Siahaan
Staff Direktorat PPHLN,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |

- KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi USDRP tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi USDRP tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Pekerjaan Umum.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
WIS



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Keuangan
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.